

**PERAN PEMERINTAH TERHADAP PRAKTIK PELAYANAN
TELEMEDICINE ANTARA DOKTER DAN PASIEN DI
INDONESIA DARI PERSPEKTIF YURIDIS**

FARHANNUDDIN

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa terhadap praktik *telemedicine* antara dokter dan pasien di Indonesia dari perspektif yuridis. Pembahasan dalam tulisan ini diarahkan pada *library research*, pendekatan *statute approach* dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan. Pelaksanaan layanan *telemedicine* di Indonesia masih banyak menimbulkan polemik hukum terkait dengan dimensi izin praktik dokter sebagai pemberi layanan *telemedicine*, pengaturan terhadap hak dan tanggung jawab penyedia layanan *telemedicine* maupun standarisasi sumber daya manusia pemberi layanan *telemedicine* serta jaminan keamanan rekam medis yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Peran pemerintah dalam pengawasan praktik *telemedicine* antara dokter dan pasien di Indonesia dengan mengkategorikan pelayanan *telemedicine* saat ini harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang terdaftar resmi. Pemerintah juga perlu membentuk peraturan yang mendetail tentang layanan *telemedicine* antara dokter dan pasien dengan kolaborasi dari berbagai lintas sektor di bidangnya masing-masing.

Kata Kunci : Layanan *telemedicine*, Hubungan dokter dan pasien, Peran pemerintah.

**THE GOVERNMENT’S ROLE IN DOCTOR-PATIENT
TELEMEDICAL SERVICE PRACTICES IN INDONESIA
FROM THE JURIDICAL PERSPECTIVE**

FARHANNUDDIN

Abstract

This research aims at analyzing government’s role in doctor-patient telemedical practice in Indonesia from juridical perspective. Discussion in this paper is directed to library research, statute approach and other relevant documents approach. Telemedical service implementation in Indonesia still causes legal polemics related to the dimension of doctor practice permit as telemedical service provider, regulation of telemedical service provider’s rights and obligations, human resources standardization of telemedical service provider and accountability of medical record security guarantee. Government’s role in supervising doctor-patient telemedical practice in Indonesia with categorization of current telemedical service must be conducted at authorized health service facility. The government also needs to stipulate a detailed regulation on doctor-patient telemedical service in collaboration with various sectors of every field.

Keywords: Telemedical service, Doctor and patient relationship, Government’s role.